

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BPPMHKP AMBON TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN AMBON
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Ambon.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Ambon. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Ambon, 30 Desember 2024
Kepala,



Muhammad Hatta Arisandi

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan, menilai efektivitas program, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan. Transparansi juga mendorong terciptanya tata kelola yang baik (good governance), mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Implementasi keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari komitmen moral untuk melayani masyarakat secara jujur dan profesional. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan demokrasi, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Pentingnya informasi yang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya serta menjadi bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu juga keterbukaan informasi publik merupakan salah identitas terbentuknya Negara yang demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

B. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Ambon ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Ambon

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan

1) Menjamin hak masyarakat atas informasi

Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mengetahui kebijakan, program, serta kegiatan badan publik.

2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

Mendorong badan publik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat

Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, serta evaluasi program pembangunan.

4) Mendorong terwujudnya good governance

Transparansi informasi memperkuat prinsip demokrasi, tata kelola yang baik, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

5) Meningkatkan kepercayaan public

Dengan informasi yang terbuka, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan menumbuhkan rasa percaya kepada pemerintah maupun lembaga publik.

6) Mendukung pembangunan berkelanjutan

Informasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta perencanaan yang berpihak kepada kepentingan bersama.

Prinsip

1. Transparansi

Informasi publik harus disediakan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas

Badan publik wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Partisipasi

Keterbukaan informasi memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

4. Keadilan

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi tanpa diskriminasi.

5. Keterjangkauan dan Kemudahan Akses

Informasi harus disediakan dengan cara yang mudah diperoleh, baik melalui teknologi informasi maupun sarana lain yang dapat dijangkau masyarakat.

6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Masyarakat berhak mendapatkan informasi, namun juga berkewajiban menggunakan informasi tersebut secara bijak, tidak disalahgunakan, dan menghormati hak privasi maupun kerahasiaan negara.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Ambon meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Ambon
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Ambon
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana

- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
 - Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
 - Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Ambon
 - Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
 - Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
 - Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
 - Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik □
- Mengoordinasikan :
- 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau perubahan pengklasifikasi informasi publik
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. SARANA PRASARANA

Adapun fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

Dokumentasi Fasilitas Ruang PPID

Tampilan Depan



Tampilan Dalam Ruangan



BAB II.

Hasil pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Ambon adalah team Penata Laksanaan BPPMHKP Ambon.

2. Waktu

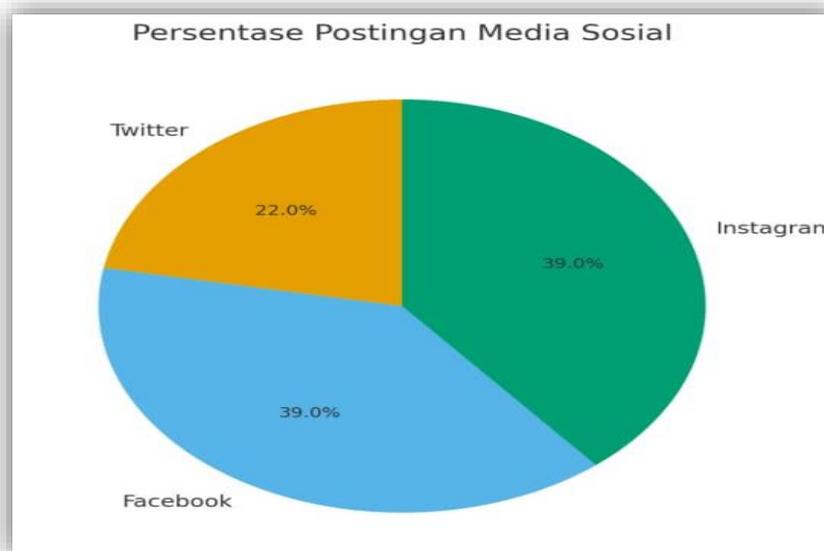
Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Ambon tahun 2024 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Presentase Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP Ambon sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Ambon diinformasikan melalui media social milik BPPMHKP Ambon yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Presentase Postingan Media Sosial BPPMHKP Ambon Tahun 2024



B. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi dapat langsung ke ruang layanan PPID sehingga dilayani dengan baik dan langsung diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPIDBPPMHKP Ambon. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh secara cepat petugas PPID secara Online.

Periode tahunan pada tahun 2024

Permintaan informasi sebagian besar datang dari pemohon yang bergerak disektor usaha perikanan atau para Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan. selain itu juga terdapat Pemohon informasi yang secara langsung menggunakan media sosial seperti mahasiswa dan pelajar SMA / SMK yang ingin magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di unit unit kerja yang ada di lingkungan BPPMHKP Ambon serta Permohonan Informasi terkait Layanan Sertifikasi oleh Pengguna Jasa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BPPMHKP Ambon jika memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dipersyaratkan maka informasi yang diminta akan disetujui dan langsung ditindaklanjuti. Berikut disajikan rekap permohonan informasinya:

**TABEL REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP AMBON
PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2024**

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU	BENTUK INFOTMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMAH	DITOLAK		PENYELESAIAN	CETAK	REKAM	ONLINE
						HARI				
1	Januari	5	5	5	0	-	3			√
2	Februari	0	0	0	0	-	0			√
3	Maret	0	0	0	0	-	0			√
4	April	1	1	1	0	-	2			√
5	Mei	0	0	0	0	-	0			√
6	Juni	1	1	1	0	-	2			√
Total		7	7	7	0					

**TABEL REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP AMBON
PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2024**

NO	BULAN	JUMLAH PENGADUAN	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN	BENTUK INFOTMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMAH	DITOLAK		HARI	CETAK	REKAM	ONLINE
1	Juli	1	1	1	0	-	2			√
2	Agustus	2	2	2	0	-	2			√
3	September	0	0	0	0	-	0			√
4	Oktober	2	2	2	0	-	1			√
5	November	0	0	0	0	-	0			√
6	Desember	0	0	0	0	-	0			√
Total		5	5	5	0					

Tabel. Tabel rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Ambon Semester I dan II Tahun 2024

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Ambon telah dilaksanakan ditahun 2024 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram, Facebook. Pada bulan Januari - Desember tahun 2024 BPPMHKP Ambon telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID BPPMHKP Ambon juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Ambon tahun 2024 dan sudah diselesaikan semua permohonan informasinya.

B. KENDALA

- Sebagian besar Permohonan informasi yang masuk oleh pemohon tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Pelaksanaan tentang Keterbukaan informasi di berbagai media social seperti twitter, Instagram, Facebook secara umum telah berjalan dengan baik, namun perlu diadakan kegiatan berupa Edukasi ataupun Sosialisasi secara langsung tentang Ketentuan dan persyaratan sebagai Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Ambon untuk mengevaluasi pelaksanaan atau implementasi standar layanan informasi publik tersebut guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Ambon tetap terlaksanakan dengan baik.

BAB IV.

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Ambon Tahun 2024 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Ambon dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

Lampiran Agenda Kerja Pimpinan Tahun 2024

DAFTAR KEGIATAN PIMPINAN TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	TUJUAN
1	Sinkronisasi Data SAKTI Tahunan (Unaudited) TA. 2023 Lingkup BPPMHKP	persiapan penyusunan laporan keuangan dan Sinkronisasi Data SAKTI T.A 2023 (Unaudited) lingkup BPPMHKP, sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu No. S.31/PB/PB.6/2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2023 (Unaudited) serta persiapan pengalihan Personil, Pembiayaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D) terkait pemisahan organisasi
2	Koordinasi Tindak Pelanggaran Karantina dan Mutu	Tindak pelanggaran karantina dan mutu dapat ditangani oleh Pejabat Karantina atau PPNS dengan cara: Menerima atau memeriksa laporan pengaduan Menginvestigasi tindakan pelanggaran Berkolaborasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia Melakukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran Berkoordinasi dengan pejabat struktural untuk menyiapkan sanksi administratif
3	kegiatan Rapat Kerja Teknis BPPMHKP Tahun 2024	merumuskan kebijakan teknis terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan maka akan diselenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPPMHKP Tahun 2024 di Yogyakarta dengan tema "Sinergi Mewujudkan Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia yang Maju dan Berkelanjutan
4	Inspeksi dan Sertifikasi CPIB	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) adalah layanan yang memberikan pedoman dan tata cara dalam mengembangbiakkan ikan. Sertifikasi ini dilakukan dengan menerapkan teknologi yang memenuhi persyaratan teknis dan kriteria tertentu
5	Melaksanakan Surveilans HACCP ke Unit Pengolahan Ikan	penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu dilakukan kegiatan Inspeksi yang menjadi dasar menerbitkan Sertifikat Kesehatan/ <i>Health Certificate</i>
6	melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis CPIB	Bimbingan Teknis (Bimtek) CPIB adalah kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam penanganan ikan yang baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik: Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Bimtek CPIB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam memahami cara penanganan ikan yang baik agar mutu ikan terjaga dan nilai jualnya meningkat. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Bimtek CPIB bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi CPIB, yaitu standar sistem mutu pembenihan ikan yang harus diterapkan oleh pembenih ikan
7	Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Kota Tual, Survei Bersama Calon Lokasi Pembangunan Laboratorium Keamanan Pangan di Kota Tual, serta Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama BPPMHKP dengan BKI Satuan Pelayanan Tual	Kunjungan kerja Menteri KKP dengan tujuan untuk menindaklanjuti program Transformasi Tata Kelola Perikanan Nasional
8	Rapat Penyusunan Rencana Kerja BPPMHKP Tahun 2024	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Februari 2024, yang memberi amanat kepada BPPMHKP untuk menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir
9	Validasi IKU Level II dan Tim Kerja lingkup UPT BPPMHKP Tahun 2024 dan Koordinasi Kegiatan Operasional di BPPMHKP Jakarta I	dengan dilakukan revisi renja tahun 2024 dan adanya perubahan informasi kinerja pada BPPMHKP, diperlukan validasi indikator kinerja untuk membentuk mekanisme kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	Undangan Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024	peningkatan serta sebagai bentuk apresiasi pada penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Ambon dinobatkan sebagai Unit Organisasi Kualifikasi Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik

11	Melaksanakan Surveilans HACCP ke Unit Pengolahan Ikan	penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu dilakukan kegiatan Inspeksi yang menjadi dasar menerbitkan Sertifikat Kesehatan/ <i>Health Certificate</i>
12	Rapat Koordinasi Otoritas Kompeten Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Rapat Koordinasi Otoritas Kompeten dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah acara yang diadakan di Hotel Sheraton Bandar Lampung pada tanggal 28 Agustus 2024. Provinsi Lampung menjadi tuan rumah acara ini.
13	Peresmian Pelabuhan Perikanan Ukurlaran – SKPT Saumlaki	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU) adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan sejak praproduksi hingga pemasaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu bagi kesehatan manusia.
14	Menghadiri Undangan Finalisasi RKA-KL TA. 2025	Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025
15	Diseminasi Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada kegiatan sertifikasi hulu hilir. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha penting dilakukan guna mendapatkan produk yang bermutu tinggi

SAMPLING DATA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

Nomor : B.2384/SJ.5/HM.470/VII/2024 18 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Lima berkas
Hal : Undangan Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka peningkatan serta sebagai bentuk apresiasi pada penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Petugas Layanan Informasi Publik sebagai **Unit Organisasi Kualifikasi Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik** untuk hadir pada kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis s/d Jumat, 25 s/d 26 Juli 2024
waktu : 08.00 WIB s.d selesai
tempat : Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 1
agenda : 1. Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
oleh Bapak Sekretaris Jenderal KKP
2. Penandatanganan Komitmen Bersama
3. Konsultasi dan Bimbingan Pemenuhan Data Dukung Monev
Keterbukaan Informasi Publik

Konfirmasi kehadiran : https://bit.ly/Konfirmasi_Kehadiran_AKIP

Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, kami menugaskan sebagai narahubung adalah Saudari Rae Anggrainy (0821 7936 7975)

Demikian kami menyampaikan undangan, atas perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ari Prabowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.2384/SJ.5/HM.470/VII/2024
Tanggal : 18 Juli 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT UNDANGAN

- I. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 2. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
 3. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
 4. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar
 5. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar
 6. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
 7. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong
 8. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
 9. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang

- II. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**
 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 11. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang
 12. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
 13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
 14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
 15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
 16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
 17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

- III. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**
 18. Sekretaris Direktorat Jenderal Budi Daya
 19. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
 20. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
 21. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
 22. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
 23. Plt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
 24. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
 25. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
 26. Plt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
 27. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
 28. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
 29. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
 30. Plt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandiangin
 31. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang
 32. Kepala Balai Produksi Induk Unggul dan Kekeperangan Karangasem
 33. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

IV. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

34. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
35. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

V. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

36. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
37. Kepala Pangkalan PSDKP Batam
38. Plt. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa
39. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap
40. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak

VI. Inspektorat Jenderal

41. Sekretaris Inspektorat Jenderal

VII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

42. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
43. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
44. Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
45. Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur
46. Kepala Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi
47. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok
48. Kepala Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi
49. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan
50. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal
51. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi
52. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon
53. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

VIII. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

54. Sekretaris Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
55. Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I
56. Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar
57. Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II
58. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I
59. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan

60. Plt. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado
61. Plt. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang
62. Plt. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan
63. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
64. Plt. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
65. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh
66. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam
67. Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang
68. Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkal Pinang
69. Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta
70. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon
71. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung
72. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak
73. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong

Lampiran Surat Undangan
 Nomor : B.2384/SJ.5/HM.470/VII/2024
 Tanggal : 18 Juli 2024

AGENDA KEGIATAN
FORUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2024
Jakarta, 25-26 Juli 2024

Tanggal/Waktu	Agenda	Keterangan
Rabu, 24 Juli 2024		
15.00 WIB- Selesai	Gladi Bersih	Ballroom GMB III, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kamis, 25 Juli 2024		
08.00 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Ballroom GMB III, Kementerian Kelautan dan Perikanan
08.30 – 08.40 WIB	- Pembukaan oleh MC - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars KKP	
08.40 - 08.45 WIB	Pemutaran Video Keterbukaan Informasi Publik KKP	
08.45 - 09.00 WIB	Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik KKP	
09.00 - 09.15 WIB	Pengumuman Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	
09.15 - 09.30 WIB	Penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	
09.30 - 09.45 WIB	Keynote Speech oleh Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Memimpin Peluncuran <i>Kick Off</i> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024	
09.45 - 10.30 WIB	Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat	
10.30 - 11.00 WIB	Materi 1: "Potret tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia"	
11.00 - 11.30 WIB	Materi 2: "Tantangan dan Strategi Badan Publik dalam Menjalankan Amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital"	
11.30 - 12.00 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab	
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	

13.00 - 14.00 WIB	Materi 3: "Penguatan PPID Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital"	
14.00- 16.00 WIB	Pembahasan Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP	
Jumát, 26 Juli 2024		
08.30 - 11.30 WIB	Konsultasi dan Bimbingan Pemenuhan Data Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik	Ruang Rapat Tuna GMB 4 Lt.15
11.30 - 11.35 WIB	Penutupan kegiatan	

Note :

1. Narahubung Acara :
 - Rae Anggrainy (0821 7936 7975)
 - Awaluddin (0822 1495 9997)
2. Dress Code : Seragam Hitam Putih KKP
3. Peserta melakukan konfirmasi kehadiran melalui tautan : https://bit.ly/Konfirmasi_Kehadiran_Forum_PPID
4. Penerima penghargaan Unit Organisasi Kualifikasi Informatif dimohon untuk mengikuti Gladi Bersih pada hari Rabu, 24 juli 2024 pukul 15.00 WIB



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.3691/BPPMHKP.1/TU.330/IX/2024 25 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua berkas
Hal : Undangan Finalisasi RKA-KL TA. 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk hadir dalam Rapat Finalisasi Penyusunan RKA-KL TA. 2025 yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu-Jum'at, 2-4 Oktober 2024
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Mulia Grand Ballroom Lt. PL
Bigland Hotel Bogor
Jl. Malabar 1B, Kel. Tegallega, Kab. Bogor Tengah
acara : Finalisasi RKA-KL BPPMHKP TA. 2025

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, dimohon hadir tepat waktu dengan mempersiapkan dan membawa usulan RKA-K/L, dokumen/data dukung (RAB, KAK). Perlu kami informasikan bahwa panitia hanya menanggung akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Registrasi peserta dapat melalui Link <https://forms.gle/5RN8QaKdmY1TSqYX8>, paling lambat tanggal 28 September 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP
Sekretaris BPPMHKP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:
Kepala BPPMHKP

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.3691/BPPMHKP.1/TU.330/IX/2024

Tanggal : 25 September 2024

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

Kementerian Keuangan

1. Direktur Ekontim Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Kementerian PPN/Bappenas

1. Direktur Kelautan dan Perikanan, Deputi Bid. Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu : 3 orang
2. Plt. Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Produksi Primer : 3 orang
3. Plt. Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Pasca Panen : 3 orang
4. Kepala Balai Besar KIPM Makassar : 2 orang
5. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I : 2 orang
6. Kepala Balai KIPM Denpasar : 2 orang
7. Kepala Balai KIPM Balikpapan : 2 orang
8. Kepala Balai KIPM Mataram : 2 orang
9. Kepala Balai KIPM Jayapura : 2 orang
10. Kepala Balai KIPM Manado : 2 orang
11. Kepala Balai KIPM Banjarmasin : 2 orang
12. Kepala Balai KIPM Entikong : 2 orang
13. Kepala Balai KIPM Tarakan : 2 orang
14. Kepala Balai KIPM Ambon : 2 orang
15. Kepala Balai KIPM Surabaya I : 2 orang
16. Kepala Balai KIPM Medan I : 2 orang
17. Kepala Balai KIPM Jakarta II : 2 orang
18. Kepala Balai KIPM Surabaya II : 2 orang
19. Kepala Balai KIPM Semarang : 2 orang
20. Kepala Balai KIPM Lampung : 2 orang
21. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang : 2 orang
22. Kepala Balai Uji Standar KIPM : 2 orang
23. Kepala Stasiun KIPM Kendari : 2 orang
24. Kepala Stasiun KIPM Palu : 2 orang
25. Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai : 2 orang
26. Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya : 2 orang
27. Kepala Stasiun KIPM Kupang : 2 orang
28. Kepala Stasiun KIPM Bima : 2 orang
29. Kepala Stasiun KIPM Ternate : 2 orang
30. Kepala Stasiun KIPM Tahuna : 2 orang
31. Kepala Stasiun KIPM Gorontalo : 2 orang
32. Kepala Stasiun KIPM Sorong : 2 orang

33. Kepala Stasiun KIPM Bau-Bau	: 2 orang
34. Kepala Stasiun KIPM Merauke	: 2 orang
35. Kepala Stasiun KIPM Mamuju	: 2 orang
36. Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru	: 2 orang
37. Kepala Stasiun KIPM Palembang	: 2 orang
38. Kepala Stasiun KIPM Padang	: 2 orang
39. Kepala Stasiun KIPM Jambi	: 2 orang
40. Kepala Stasiun KIPM Bengkulu	: 2 orang
41. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	: 2 orang
42. Kepala Stasiun KIPM Pangkal Pinang	: 2 orang
43. Kepala Stasiun KIPM Pontianak	: 2 orang
44. Kepala Stasiun KIPM Cirebon	: 2 orang
45. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta	: 2 orang
46. Kepala Stasiun KIPM Aceh	: 2 orang
47. Kepala Stasiun KIPM Batam	: 2 orang
48. Kepala Stasiun KIPM Merak	: 2 orang
49. Kepala Stasiun KIPM Medan II	: 2 orang
50. Kepala Stasiun KIPM Bandung	: 2 orang
51. Ketua Tim Kerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP	

“Jadwal Finalisasi RKAKL TA.2025 Lingkup BPPMHKP”

Hari/tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Pembicara	Tempat
Rabu, 2 Oktober 2025				
	11:00 – 12:00	Registrasi Peserta		Mulia Grand Ballroom Lt. PL
	12:00 – 13:00	CHECK IN		
	13:00 – 15:30	Finalisasi RKA-KL 2025	Setban dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	15:30 – 15:45	Coffee Break		
	15:45 – 18:00	Finalisasi RKA-KL 2025	Setban dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	18:00 – 19:30	ISHOMA		
	19:30 – 21:00	Pembukaan dan Pengarahan Kepala BPPMHKP Paparasi Eselon II Lingkup BPPMHKP	Kepala BPPMHKP Pejabat Eselon II BPPMHKP	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	21:00 – 21:15	Coffee Break		
	21:15 – 22:30	Paparasi Eselon II Lingkup BPPMHKP		Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
Kamis, 3 Oktober 2025				
	08:30 – 09:30		Dir.Ekontim DJA Bappenas	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	09:30 – 09:45	Coffee Break		
	09:45 – 12:00	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	12:00 – 13:00	ISHOMA		
	13:00 – 15:00	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	15:00 – 15:15	Coffee Break		
	15:10 – 18:00	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI

	18:00 – 19:00	ISHOMA		
	19:00 – 20:30	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	20:30 – 20:45	Coffee Break		
	20:45 – 22:30	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
Jumat, 4 Oktober 2025				
	08:30 – 09:30	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	09:30 – 09:45	Coffee Break		
	09:45 – 11:30	Finalisasi RKA-KL 2025	Inspektorat 4 dan Pusat-Pusat	Mulia Grand Ballroom Lt. PLI
	11:30 – 14.00	ISHOMA		
	14.00 – 17.00	Penutupan		